

UPAYA MEMINIMALISIR DAMPAK GEMPA

Yulia Indahri^{*)}



Abstrak

Sebagai negeri rawan bencana, Indonesia harus siap menghadapi musibah yang datang. Kesiapsiagaan menghadapi bencana akan mengurangi dampak yang ditimbulkan. Kepemimpinan aparat negara di seluruh tingkat merupakan hal penting dalam sistem nasional penanggulangan bencana. Langkah antisipasi dalam pengambilan keputusan serta langkah cepat ketika bencana telah terjadi harus menjadi pertimbangan bagi para pemimpin melalui pengaturan penataan ruang yang lebih baik dengan berbasis mitigasi bencana.

A. Pendahuluan

Aceh kembali digoncang gempa. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa berkekuatan 6,2 skala Richter tersebut berpusat pada posisi 4,70 LU, 96,61 BT, 35 km barat daya Kabupaten Bener Meriah, dengan kedalaman 10 kilometer pada 2 Juli 2013 pukul 14.37:03 WIB). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menginformasikan bahwa gempa di Provinsi Aceh ini menelan korban 40 orang meninggal, 4 hilang, 141 orang luka berat, 15.919 unit rumah rusak, dan 623 unit bangunan fasilitas umum rusak. Korban di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah dirinci dalam Tabel.

Sebagian besar korban luka berat dirawat di RSUD Datu Beru dan sebagian rawat jalan. Beberapa korban yang luka serius, yaitu empat orang anak, telah diterbangkan ke RS Banda Aceh dari Bener Meriah untuk mendapatkan

Tabel Rincian Dampak Gempa

Dampak		Kab. Bener Meriah	Kab. Aceh Tengah
Korban jiwa	Meninggal	9 orang	26 orang
	Luka	109 orang	166 orang
	Mengungsi	12.500 orang	3.500 orang
Rusak	Rumah	789 unit	3.503 unit
	Fasum	8 fasum	75 unit
Titik pengungsian		15	20

Sumber: BNPB, 8 Juli 2013

^{*)} Peneliti bidang Studi Masyarakat dan Sosiologi Perkotaan pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: y.indahri@gmail.com



perawatan yang lebih baik. Semua korban sudah diidentifikasi nama, usia, dan alamat, dan sampai saat ini pemutakhiran data terus dilakukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran.

Gubernur Aceh menyatakan, pada minggu pertama di dua minggu masa tanggap darurat akan difokuskan pada upaya pencarian dan penyelamatan korban, perawatan dan pengobatan bagi korban luka-luka dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, seperti kebutuhan sandang, permakanan, air bersih, obat-obatan, sanitasi, penampungan sementara dan pelayanan kesehatan. Masa tanggap darurat ini selanjutnya akan dievaluasi sesuai kondisi di lapangan.

Mengingat kebutuhan mendesak yang diperlukan pengungsi dalam beberapa hari pertama adalah tempat tinggal dan kebutuhan pangan, maka Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) telah memberikan bantuan kepada BPBA Bener Meriah dan BPBA Aceh Tengah berupa beras, mi instan, air mineral, minyak goreng, sarden, saus sambal, gula, kecap, selimut, kelambu, dan daster/pakaian wanita. Dinas Sosial di kedua kabupaten juga telah mengeluarkan masing-masing dua ton beras untuk penanganan awal. Selain itu, Kementerian Sosial mengirimkan bantuan termasuk tenda gulung, tenda keluarga, tenda pengungsi, matras dan genset. Helikopter milik TNI AU dari Riau ke Aceh ikut dikirimkan untuk penanganan penyelamatan dan pencarian korban. Sebanyak 1.524 personel gabungan TNI/Polri siap dikerahkan ke Aceh untuk membantu rangkaian kegiatan di minggu pertama.

Kepala BNPB menekankan pengadaan tenda dan selimut yang harus segera dipenuhi mengingat banyak masyarakat yang masih trauma untuk tinggal di rumah. Selain itu, daerah bencana adalah daerah berudara dingin, terutama di malam hari, karena berada di pegunungan.

B. Penyebab Gempa

Gempa awal Juli 2013 ini merupakan gempa yang dipicu gempa sebelumnya. Setelah gempa besar yang memicu tsunami pada

tahun 2004 lalu, Aceh sebenarnya lebih riskan terhadap gempa yang berpusat di daratan. Gempa laut memang berbahaya karena bisa menimbulkan tsunami, tetapi gempa darat juga bisa sangat merusak dan menimbulkan longsor, seperti yang terjadi di Tahiti pada tahun 2010 yang menewaskan 200.000 jiwa dan gempa di Yogyakarta tahun 2006 yang menewaskan lebih dari 5.000 orang.

Pakar gempa Institut Teknologi Bandung, Irwan Meilano, menjelaskan bahwa ketika gempa 2004 terjadi, energi yang sangat besar terlepas. Energi ini meningkatkan regangan di wilayah sekitarnya. Di daratan, energi ini akan mempercepat siklus gempa. Frekuensi gempa daratan yang bersumber dari segmen Aceh telah meningkat tajam. Sebelumnya, dari tahun 1980 hingga 2004, hanya ada 12 gempa bermagnitudo di atas 5. Namun, setelah tahun 2004, sudah tercatat ada 33 gempa bermagnitudo di atas 5. Bila sebelumnya hanya ada 1 gempa dalam 2 tahun, kini ada 3 gempa yang merusak dalam setahun. Artinya, pasca-2004, gempa daratan di Aceh meningkat enam kali lipat.

Pengaturan umum untuk meminimalisir dampak gempa disandarkan pada pedoman Standar Nasional Indonesia (SNI) 1726 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-gedung yang mengatur standar bangunan tahan gempa. Selain itu, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sudah memuat arahan penataan ruang berbasis mitigasi bencana mengingat secara geografis Indonesia berada pada kawasan rawan bencana. Pemerintah dan DPR-RI pun telah mengesahkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Produk hukum di bawahnya antara lain Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Peraturan Kepala Badan.

Tetapi sangat disayangkan, hingga saat ini belum ada undang-undang atau peraturan daerah yang khusus, tegas, dan masif untuk meminimalisasi dampak gempa dari sisi teknis bangunan. Kita semua menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius. Kebencanaan merupakan permasalahan

yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Oleh karena itu, secara periodik, Indonesia harus terus membangun sistem nasional penanggulangan bencana yang solid.

Keberadaan BNPB sebagai pendamping koordinasi dalam penanggulangan bencana dengan dukungan BPBD dari berbagai dinas di daerah sudah seharusnya dapat dibuktikan dengan tidak ada lagi keluhan dari warga korban gempa mengenai kelambanan pendistribusian bantuan. Seharusnya tidak ada lagi warga yang menempati tenda-tenda darurat yang dibangun dengan peralatan seadanya. Selanjutnya, BNPB juga diharapkan berkoordinasi dengan pihak lain dalam pembangunan infrastruktur dalam proses rekonstruksi agar tepat sasaran dan bukan justru membangun di tempat yang rawan.

C. Antisipasi

Gempa Aceh kali ini kembali menyadarkan kita, bahwa Indonesia merupakan negara rawan bencana. Bencana, terlebih gempa, bisa datang sewaktu-waktu tanpa bisa diduga sebelumnya. Secara formal, BNPB merupakan *focal point* pemerintah di tingkat pusat sebagai bagian dari sistem nasional penanggulangan bencana. Kepala BNPB, Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, Pihak Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, bahkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Sosial sudah mengunjungi lokasi untuk berkoordinasi dengan bupati setempat.

Kepemimpinan aparat negara dalam pengambilan keputusan secara cepat dan tepat di wilayah terjadinya bencana alam merupakan hal penting dalam sistem penanggulangan bencana.

Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Itu artinya gempa sewaktu-waktu bisa datang seiring dengan pergeseran lempeng-lempeng tersebut. Belajar dari pengalaman gempa Aceh kali ini, ada pekerjaan

rumah yang harus segera diselesaikan bersama yaitu merelokasi beberapa desa terdampak gempa. Jika mengacu pada standar bangunan tahan gempa, Desa Bah, Desa Serempah, dan Desa Blang Mancung yang berada di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah serta Desa Kulemparakanis dan Desa Cekal Baru di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah merupakan desa-desa yang sudah tidak layak dibangun kembali untuk menjadi tempat pemukiman penduduk. Hampir 90 persen rumah warga rusak parah dan tidak bisa ditempati lagi. Sebagian besar korban adalah anak-anak dan warga lanjut usia yang tertimpa reruntuhan bangunan.

Belum adanya antisipasi dan kesadaran dari masyarakat akan arti penting kekuatan bangunan di daerah rawan bencana menjadi penyebab banyaknya kerusakan dan korban, karena ada indikasi bahwa mayoritas rumah warga yang rusak dan tidak bisa ditempati tersebut awalnya berdiri di atas sesar aktif Sumatera/Semangko dan dibangun tidak tahan gempa. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB menginformasikan bahwa sesar Semangko memiliki 19 segmen dan membentang sejauh 1.900 km dari Aceh hingga Lampung, melewati Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sebelumnya, di daerah sesar tersebut pernah terjadi gempa bumi 6,0 SR pada 22 Januari 2013 di Pidie, yang menyebabkan korban satu orang meninggal dunia dan tujuh orang luka-luka.

D. Penutup

Baik pemerintah pusat maupun daerah harus segera menetapkan kebijakan untuk menjadikan bangunan tahan gempa sebagai standar dalam mendirikan bangunan. DPR-RI, melalui Komisi VIII dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. BNPB sejatinya telah melakukan sosialisasi rumah tahan gempa dan memperhatikan risiko kegempaan dalam perencanaan tata ruang. Tak hanya di Aceh, sosialisasi juga seharusnya dilakukan di daerah-daerah rawan gempa lainnya. Namun, harus diakui realisasi di lapangan sangat sulit dilakukan.

Keengganan warga mendirikan rumah tahan gempa dapat dimaklumi karena di samping tidak adanya kebijakan pemerintah daerah, juga karena tingginya biaya pembangunan unit bangunan tahan gempa yang umumnya akan menelan biaya 30 persen lebih mahal daripada pembangunan unit bangunan biasa. Untuk itu, agar masyarakat mau membangun rumah atau bangunan tahan gempa, pemerintah perlu turun tangan dengan memberikan subsidi, insentif, atau kemudahan perizinan.

Pemerintah kabupaten harus lebih intensif menyosialisasikan pembangunan rumah tahan gempa kepada masyarakat di wilayahnya. Selain itu, harus ada pengawasan ketat dalam rehabilitasi rumah pascagempa dan penerbitan peraturan daerah yang mengacu pada peta bencana. Perlu juga ada upaya memasyarakatkan penggunaan konstruksi rumah yang tahan gempa, termasuk penggunaan bahan-bahan lokal yang ringan, seperti bambu. Sejalan dengan itu, pembuatan rencana tata ruang dan wilayah sebaiknya memperhatikan aspek kebencanaan, sehingga unit bangunan privat dan publik tidak lagi berada di kawasan rawan bencana.

Rujukan:

1. "Pengungsi Gempa Aceh Mencapai 16.000 Jiwa," <http://www.bnpb.go.id/news/read/1472/>, diakses 5 Juli 2013.
2. "Meminimalisasi Dampak Gempa," Editorial *Media Indonesia*, 5 Juli 2013, h. 1.
3. "Perda Rumah Tahan Gempa Mendesak Diterbitkan," *Media Indonesia*, 5 Juli 2013, h. 1.
4. "Ancaman Utama Aceh Bukan Tsunami, melainkan Gempa Daratan," <http://sains.kompas.com/read/2013/07/04/1337250/>, diakses 5 Juli 2013.
5. "Pasca-2004, Frekuensi Gempa Daratan di Aceh Meningkat 6 Kali Lipat," <http://sains.kompas.com/read/2013/07/04/1256007/>, diakses 5 Juli 2013.
6. "Menkokesra dan Mensos Kunjungi Korban Gempa Gayo," <http://regional.kompas.com/read/2013/07/03/2123116/>, diakses 4 Juli 2013.
7. "Pemerintah Siapkan Rp 40 Miliar untuk Gempa Aceh," <http://regional.kompas.com/read/2013/07/03/2013066/>, diakses 4 Juli 2013.
8. "BNPB: Gempa Bisa Berdampak ke Wilayah Lain Sumatera," <http://regional.kompas.com/read/2013/07/03/1810104/>, diakses 4 Juli 2013.
9. "Gubernur Aceh Kunjungi Lokasi Gempa Terparah," <http://regional.kompas.com/read/2013/07/03/1709306/>, diakses 4 Juli 2013.
10. "Antara Gempa Aceh Juli 2013 dan Gempa Yogyakarta 2006," <http://sains.kompas.com/read/2013/07/03/1423284/>, diakses 4 Juli 2013.
11. "Gempa Aceh Ingatkan Lagi Pentingnya Bangunan Tahan Gempa," <http://sains.kompas.com/read/2013/07/03/1250011/>, 4 Juli 2013.
12. "Bagaimana Mekanisme Terjadinya Gempa Aceh Hari Ini?" <http://sains.kompas.com/read/2013/07/02/2230575/>, diakses 5 Juli 2013.
13. "Rilis Pers Dampak dan Penanganan Bencana Gempa Bumi 6,2 SR di Bener Meriah dan Aceh Tengah," <http://www.bnpb.go.id/news/read/1459/>, diakses 5 Juli 2013.
14. "22 Meninggal, 210 Luka-luka dan Ribuan Bangunan Rusak Akibat Gempa Aceh," <http://www.bnpb.go.id/news/read/1458/>, diakses 5 Juli 2013.